

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi di Indonesia menandai babak baru dalam penyelenggaraan demokrasi yang membuka ruang partisipasi politik seluas-luasnya bagi seluruh warga negara melalui pemilihan umum secara langsung, baik itu dari presiden sampai dengan kepala daerah di tingkat lokal (Manar, 2016). Pemilihan umum (pemilu) menjadi arena penting untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, di mana setiap individu memiliki hak untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan publik. Komitmen terhadap kesetaraan politik juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 yang meratifikasi *Convention on the Political Rights of Women*, menegaskan prinsip kesetaraan kedudukan tanpa diskriminasi, mencakup jaminan hak yang sama bagi perempuan untuk memilih dan dipilih, berpartisipasi dalam perumusan kebijakan, memperoleh kesempatan menduduki jabatan birokrasi, serta terlibat dalam organisasi sosial dan politik (Sanger, 2019). Selanjutnya, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara.

Perempuan tidak lagi diposisikan sebagai objek politik, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak setara untuk memilih, dipilih, dan terlibat aktif dalam setiap tahapan proses politik. Salah satu upaya negara untuk

mengakomodasi prinsip kesetaraan adalah melalui kebijakan *affirmative action* berupa kuota 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif, sebagaimana tertuang dalam UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik serta diperkuat dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Regulasi ini menjadi payung hukum bagi peningkatan representasi perempuan di ruang publik, yang secara normatif memberikan peluang besar bagi perempuan untuk berperan aktif dalam politik elektoral maupun pengambilan keputusan publik. Namun, sebagaimana yang dikemukakan oleh Fauzan (2017) meskipun peluang ini telah terbuka, partisipasi politik perempuan masih berjalan lambat dan seringkali terkendala oleh faktor budaya patriarkal, rendahnya pendidikan politik, serta ketergantungan pada figur laki-laki dalam arena politik. Hal serupa juga ditegaskan dalam penelitian White *et al.* (2023) yang menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen responden survei nasional masih beranggapan bahwa laki-laki seharusnya menjadi pengambil keputusan utama di komunitas, sementara hanya 45% yang mendukung peningkatan jumlah perempuan dalam kepemimpinan politik. Oleh karena itu, meskipun secara formal negara telah membuka akses partisipasi politik bagi perempuan, namun kualitas keterlibatan warga, utamanya perempuan masih menimbulkan pertanyaan. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara peluang politik yang tersedia secara normatif dengan realitas substantif partisipasi yang dihadapi di tingkat akar rumput.

Secara kuantitatif, data Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah penduduk potensial pemilih pemilu 2024 mencapai 204.656.053 jiwa, terdiri dari 102.181.591 laki-laki (49,92%) dan 102.474.462 perempuan

(50,08%) (Nugraheni, 2023). Artinya, perempuan merupakan mayoritas pemilih yang suaranya dapat menentukan legitimasi dari kandidat terpilih. Namun, tingginya angka tersebut tidak serta merta mencerminkan kualitas partisipasi politik perempuan itu sendiri. Studi mengenai perilaku memilih perempuan pedesaan Kushandajani *et al.* (2023) mengemukakan bahwa pilihan politik perempuan seringkali tidak diputuskan secara mandiri, melainkan dipengaruhi oleh figur laki-laki di sekitar mereka, seperti suami, orang tua, atau tokoh masyarakat. Schaffer (2014) juga menambahkan bahwa relasi kekuasaan patriarki di dalam rumah tangga dapat secara langsung membentuk perilaku memilih perempuan karena laki-laki membatasi kemandirian politik mereka dengan menempatkan suara mereka di bawah kontrol laki-laki melalui mekanisme *controlled voting*, yaitu ketika perempuan mengikuti arahan kepala keluarga laki-laki, maupun *proxy voting*, ketika laki-laki memberikan suara atas nama perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan belum sepenuhnya otonom dalam menentukan pilihan politik mereka. Pertanyaan kritis yang perlu diajukan bukan lagi sekadar apakah perempuan sudah ikut memilih, melainkan sejauh mana pilihan mereka otonom dan benar-benar lahir dari keputusan yang sadar, bebas, dan mandiri.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat lokal (Riyanti & Firmanto, 2025). Melalui Pilkada, rakyat diberi ruang untuk secara langsung menentukan pemimpin daerahnya, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Dalam konteks Kota Semarang, Pilkada diwujudkan dalam bentuk

Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot). Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Nomor 1165 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada 2024 di Kota Semarang mencapai 1.265.192 orang, terdiri atas 613.751 laki-laki dan 651.441 perempuan. Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah perempuan sama besar dengan laki-laki sehingga suara perempuan juga ikut menentukan seberapa kuat legitimasi calon terpilih (Kushandajani *et al.*, 2023). Namun dominasi jumlah ini belum otomatis berbanding lurus dengan kemandirian politik perempuan dalam menentukan pilihannya. Justru, gejala budaya patriarki yang melekat kuat membuat eksistensi kelompok perempuan cenderung dilihat sekedar lumbung suara semata yang dimobilisasi oleh aktor-aktor politik melalui jaringan keluarga, tokoh lokal, dan mekanisme patronase (Mayrudin *et al.* 2023). Fenomena ini patut ditelaah lebih dalam pada kelompok masyarakat dengan kerentanan sosial dan ekonomi yang spesifik, seperti masyarakat di kawasan pesisir.

Kampung Nelayan Tambak Lorok merupakan kampung nelayan terbesar di Kota Semarang yang melingkupi 5 RW dari Kelurahan Tanjung Mas yaitu RW 12, 13, 14, 15, dan 16. Namun demikian, kampung nelayan ini menyumbang banyak jumlah keluarga miskin, yaitu mencapai 1.108 KK atau sebesar 38% kemiskinan di Kelurahan Tanjung Mas (Muntiani, 2020). Adapun permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir umumnya disebabkan oleh ketergantungan mereka terhadap sumber daya laut dan pantai, yang membuat mereka rentan terhadap kondisi alam seperti musim paceklik

atau angin barat karena tidak bisa melaut secara optimal Niti (2019). Akibatnya, pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan infrastruktur menjadi tantangan besar bagi mereka (Jamilah, 2019). Dalam situasi ekonomi yang rentan, perempuan pesisir, secara spesifik kelompok istri nelayan, memainkan peran ganda yang strategis. Pemilihan kelompok istri nelayan sebagai fokus penelitian didasarkan pada urgensi dinamika ekonomi mereka yang jauh lebih kompleks dibandingkan perempuan pesisir di sektor lain. Istri nelayan menghadapi tantangan volatilitas pendapatan yang ekstrem akibat ketidakhadiran suami yang melaut, faktor cuaca, hingga musim paceklik. Kondisi ini memaksa mereka mengambil alih manajemen keuangan rumah tangga sepenuhnya, mulai dari mengolah hasil tangkapan hingga membuka usaha kecil (Sari & Ekowati, 2019). Kusnadi (2000) menyatakan bahwa mereka menjalankan fungsi domestik dan ekonomi untuk mengatasi ketidakpastian penghasilan ekonomi keluarga. Sehubungan dengan itu, Raina (2025) mengungkapkan bahwa istri nelayan di Tambak Lorok adalah aktor sentral ekonomi, dimana kontribusi mereka terhadap ekonomi rumah tangga mencapai 36,64% dari total pendapatan keluarga.

Oleh karena itu, memfokuskan penelitian pada istri nelayan akan memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai bagaimana agensi terbentuk di tengah tekanan struktural yang ekstrem. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis, apakah kemandirian mereka di ranah ekonomi mampu dikonversi menjadi otonomi politik, khususnya dalam menentukan pilihan pada Pemilihan

Wali Kota (Pilwalkot) Semarang 2024? Dalam kontestasi ini, persoalan-persoalan esensial yang dihadapi masyarakat pesisir Tambak Lorok, mulai dari kemiskinan hingga masalah lingkungan seperti banjir dan rob, menjadi bagian dari diskursus dan janji politik para kandidat. Oleh karena itu, untuk memahami pilihan politik perempuan pesisir, analisis tidak bisa berhenti pada sekadar angka partisipasi, melainkan lebih dalam ke proses pengambilan keputusan mereka.

Dinamika partisipasi dan agensi politik perempuan ini telah menjadi sorotan dalam sejumlah penelitian terdahulu yang memetakan hambatan sekaligus potensi yang ada. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Khelghat-doost & Sibly (2020) yang berjudul “*The Impact of Patriarchy on Women’s Political Participation*”, dengan hasil temuan bahwa sistem patriarki menghambat partisipasi politik perempuan melalui tiga struktur utama, yaitu (1) struktur politik patriarkal, di mana politik dianggap sebagai domain laki-laki dan partai politik yang bias gender; (2) struktur sosio-ekonomi patriarkal, di mana terbatasnya akses pada pendidikan dan sumber daya ekonomi; dan (3) struktur budaya patriarkal, di mana nilai dan tradisi membatasi peran perempuan di ranah domestik. Hambatan struktural ini berdampak langsung pada perilaku memilih, sebagaimana diungkap oleh Kushandajani *et al.* (2023) di Demak dengan judul “*Kemandirian Perempuan Pedesaan dalam Menentukan Pilihan Politik di Ranah Pemilihan Kepala Desa*”. Penelitian serupa dilakukan oleh Schaffer (2014) melalui kajiannya tentang *not-so-individual voting* yang bersifat lintas negara, mengungkap fenomena

“controlled voting” di mana pilihan politik perempuan sering kali berada di bawah kendali figur laki-laki dalam keluarga. Ia menunjukkan bahwa pemungutan suara bukanlah tindakan personal, melainkan keputusan kolektif keluarga yang menegaskan struktur kekuasaan patriarki. Temuan ini menguatkan argumen bahwa otonomi politik perempuan sering kali terhambat oleh struktur sosial yang bersifat sistemik, menjadi relevan karena hambatan-hambatan tersebut besar kemungkinan juga dihadapi oleh perempuan pesisir di Tambak Lorok.

Di sisi lain, penelitian mengenai perempuan di komunitas pesisir menunjukkan gambaran yang lebih dinamis. Perempuan pesisir, yang hidup dalam lingkungan ekonomi yang rentan, justru menunjukkan kapasitas agensi yang kuat sebagai strategi bertahan hidup. Penelitian oleh Wahyuni *et al.* (2022) di Tanjungpinang, berjudul *“Self-Agency Perempuan Nelayan di Kampung Bulang, Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau”* menemukan bahwa perempuan nelayan memiliki *self-agency* (agensi diri) yang kuat, termanifestasi dalam peran ganda mereka di ranah domestik dan ekonomi. Agensi ini terlihat dari keterlibatan aktif mereka dalam aktivitas ekonomi keluarga dan partisipasi dalam organisasi sosial di tingkat lokal. Demikian pula studi Mardhiah *et al.* (2024) di Lhokseumawe, Aceh dengan judul *“The Dynamics of Political Literacy among Coastal Women: An Exploration of Political Engagement in Lhokseumawe”* menyoroti bahwa partisipasi politik perempuan pesisir dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terkonstruksi secara sosial, antara lain: norma budaya dan tradisi, persepsi gender yang bias, rendahnya literasi

politik/pendidikan, peran ganda, kondisi ekonomi, dan peran media. Stereotip bahwa politik adalah domain laki-laki masih kuat dan menjadi penghalang psikologis dan sosial. Kedua penelitian tersebut secara khusus memberikan gambaran nyata bagaimana kondisi sosial-ekonomi dan literasi politik memengaruhi keterlibatan perempuan dalam ruang publik.

Untuk menganalisis fenomena ini lebih dalam, kerangka pemberdayaan yang digagas oleh Naila Kabeer telah banyak digunakan dalam studi terkini. Penelitian oleh Riani *et al.* (2023) dengan judul “*Hambatan Dalam Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pada Partisipasi Politik Perempuan di Sumatera Barat*” telah menerapkan kerangka Kabeer untuk menganalisis hambatan keterwakilan perempuan di parlemen Sumatera Barat dengan hasil temuan ditemukan bahwa hambatan utama meliputi: kurangnya wadah bagi perempuan untuk belajar politik (rendahnya *resources*), budaya politik yang belum ramah gender (stereotip dan politik identitas), dan biaya politik yang tinggi. Meskipun budaya matrilineal ada, praktiknya tetap patriarkal dalam politik. Selain itu, penelitian oleh Susanti *et al.* (2021) berjudul “*Agency Perempuan pada Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan*” juga berhasil menggunakan kerangka Kabeer untuk mengungkap bagaimana agensi perempuan yang memiliki posisi tawar (*bargaining position*) di lingkungan pondok pesantren yang kental dengan budaya patriarki di Kalimantan Selatan. Adapun temuan dari penelitian ini yaitu bahwasanya agensi perempuan diwujudkan melalui *power* yang mereka miliki untuk mengambil peran penting di lingkungan pesantren. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ashraf (2025)

dengan judul “*Agency and Autonomy: Subversive Practices in Intergenerational Intra Household Bargaining in Karachi*” berhasil menunjukkan bagaimana perempuan, terutama dari generasi muda, menggunakan praktik-praktik subversif dalam negosiasi di tingkat rumah tangga. Mereka mungkin secara formal tetap tunduk pada norma, namun secara informal mereka menegosiasikan otonomi dalam keputusan-keputusan kecil yang secara akumulatif memperluas ruang gerak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa *agensi* dapat beroperasi secara halus di ruang privat, sebuah dinamika yang sering terlewatkan dalam studi yang hanya fokus pada politik publik. Dengan menggunakan kerangka analisis yang sama, Devi *et al.* (2025) di Surabaya menggunakan kerangka Kabeer untuk mengevaluasi program pemerintah “Sekoper” yang menemukan adanya peningkatan kepercayaan diri (*agency*) namun masih bias sasaran dalam pencapaiannya (*achievements*). Sementara itu, Lestari *et al.* (2025) di Desa Ringinanom menemukan adanya kesenjangan agensi antar generasi, di mana partisipasi perempuan desa seringkali masih bersifat simbolik dan operasional, belum menyentuh pengambilan keputusan strategis.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, diidentifikasi bahwa pilihan politik perempuan seringkali tidak otonom dan dipengaruhi oleh struktur patriarki (Kushandajani *et al.*, 2023; Schaffer, 2014). Di sisi lain, penelitian di komunitas pesisir menunjukkan bahwa perempuan memiliki agensi yang kuat di ranah sosial-ekonomi sebagai strategi bertahan hidup (Wahyuni *et al.*, 2022). Namun, sejauh ini belum banyak penelitian yang secara khusus menjembatani

temuan mengenai kuatnya agensi ekonomi perempuan pesisir dengan analisis otonomi politik mereka dalam konteks pemilihan kepala daerah. Pertanyaan kritis mengenai apakah kemandirian di dapur dan pasar juga tercermin di bilik suara masih belum terjawab, terutama dengan mempertimbangkan temuan Lestari *et al.* (2025) yang menyebutkan bahwa partisipasi di tingkat akar rumput seringkali masih bersifat simbolik.

Untuk mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggunakan kerangka pemberdayaan perempuan yang digagas oleh Naila Kabeer. Meskipun teori politik klasik tentang partisipasi telah banyak dibahas oleh pakar seperti Robert Dahl dan Samuel Huntington, pendekatan prosedural mereka belum cukup tajam untuk membedah bagaimana relasi kuasa di tingkat domestik memengaruhi kemandirian pemilih perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini akan memusatkan analisis pada dimensi agensi (*agency*) yang didasarkan pada pandangan Kabeer (1999) bahwa agensi merupakan jantung dari proses pemberdayaan, yaitu kemampuan seseorang untuk mendefinisikan tujuan hidupnya sendiri dan bertindak untuk mencapainya (*the ability to define one's goals and act upon them*). Agensi bukan sekadar tindakan memilih, melainkan sebuah proses yang melibatkan kesadaran, negosiasi, dan pengambilan keputusan strategis, bahkan dalam situasi yang penuh dengan keterbatasan. Dengan kerangka ini, otonomi politik tidak hanya dilihat dari tindakan mencoblos di bilik suara, tetapi digali lebih dalam sebagai sebuah proses bagaimana perempuan pesisir Tambak Lorok memahami realitas politik mereka, menegosiasikan pilihan dengan struktur

kuasa di sekitarnya dan menggunakan hak pilihnya sebagai strategi untuk mencapai tujuan yang mereka definisikan sendiri. Kerangka ini relevan karena tidak melihat pemberdayaan sebagai sebuah hasil akhir, melainkan sebagai sebuah proses dinamis di mana individu yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan untuk membuat pilihan-pilihan strategis dalam hidupnya, secara bertahap memperoleh kemampuan tersebut (Kabeer, 1999).

Dalam konteks penelitian ini, dimensi *resources* akan ditempatkan sebagai prasyarat (pre-kondisi) yang dimiliki perempuan pesisir, dan *achievements* sebagai hasil akhir dari keberdayaan politik mereka. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai dinamika agensi perempuan pesisir Tambak Lorok dalam menegosiasikan otonomi politiknya pada Pemilihan Wali Kota Semarang 2024, ditinjau melalui keterkaitannya dengan sumber daya (*resources*) dan capaian (*achievements*) dalam perspektif Naila Kabeer. Penelitian ini berfokus pada analisis agensi di tingkat akar rumput, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi orisinal bagi studi politik elektoral lokal dan pemahaman tentang dinamika pemberdayaan perempuan di komunitas marjinal.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana dinamika agensi perempuan pesisir Tambak Lorok dalam menegosiasikan otonomi politiknya pada Pemilihan Wali Kota Semarang 2024, ditinjau melalui keterkaitannya dengan sumber daya (*resources*) dan capaian (*achievements*) dalam perspektif Naila Kabeer?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis dinamika agensi politik perempuan pesisir, khususnya istri nelayan di Tambak Lorok dalam menegosiasikan otonomi politiknya pada Pemilihan Wali Kota Semarang 2024 melalui perspektif Naila Kabeer.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi sumber daya (*resources*) yang dimiliki istri nelayan Tambak Lorok sebagai basis bagi kemampuan mereka dalam menentukan pilihan politik pada Pemilihan Wali Kota 2024.
- b. Menganalisis proses agensi yang berlangsung saat istri nelayan mengambil keputusan dalam Pilwalkot Semarang 2024.
- c. Mengkaji capaian (*achievements*) dari pelaksanaan agensi politik istri nelayan Tambak Lorok.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini, yaitu:

- a. Penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmu politik, khususnya dalam studi gender dan partisipasi politik di tingkat lokal, dengan menyoroti

bagaimana perempuan pesisir Tambak Lorok menunjukkan otonomi politik melalui agensi mereka dalam Pilkada Semarang 2024.

- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kerangka pemberdayaan Kabeer, khususnya dalam melihat keterhubungan antara sumber daya, agensi, dan capaian perempuan pesisir dalam proses pengambilan keputusan politik.
- c. Menambah pemahaman mengenai dinamika relasi antara struktur sosial (keluarga, budaya, dan lingkungan pesisir) dengan kapasitas agensi perempuan, sehingga memperluas diskursus akademik terkait gender, politik lokal, dan demokrasi partisipatoris.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu:

- a. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan otonomi politik perempuan, khususnya di wilayah pesisir yang masih menghadapi keterbatasan akses dan tekanan sosial-budaya.
- b. Memberikan wawasan praktis mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi perempuan pesisir dalam menegosiasikan pilihan politiknya, termasuk resistensi terhadap norma sosial maupun dominasi keluarga.
- c. Menjadi wadah refleksi dan inspirasi bagi civitas akademika maupun masyarakat luas untuk memahami pentingnya penguatan kapasitas

perempuan sebagai aktor politik yang mandiri dan setara dalam demokrasi lokal.

1.5 Penelitian Terdahulu

Bagian ini menguraikan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik kajian. Dengan melihat penelitian-penelitian ini, penulis dapat mengembangkan konsep penelitian dengan lebih baik. Berikut adalah beberapa studi yang menjadi rujukan:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan
1.	Khelghat-doost & Sibly (2020) <i>The Impact of Patriarchy on Women's Political Participation</i>	Kajian Literatur/ Kualitatif	Menganalisis hambatan struktural terhadap partisipasi politik perempuan.	Sistem patriarki menghambat partisipasi politik perempuan melalui tiga struktur utama: (1) struktur politik (partai bias gender), (2) struktur sosio-ekonomi (akses terbatas), dan (3) struktur budaya (peran domestik). Patriarki adalah struktur global yang membatasi ruang gerak perempuan meski ada aturan formal.
2.	Wahyuni <i>et al.</i> (2022) <i>Self-Agency Perempuan</i>	Penelitian Kualitatif	Mengkaji agensi diri (<i>self-agency</i>) perempuan nelayan	Perempuan nelayan memiliki <i>self-agency</i> yang kuat sebagai strategi bertahan hidup. Hal

	<i>Nelayan di Kampung Bulang, Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau</i>		dalam kondisi ekonomi rentan.	ini termanifestasi dalam peran ganda di ranah domestik dan ekonomi, serta partisipasi aktif dalam organisasi sosial di tingkat lokal.
3.	Mardhiah <i>et al.</i> (2024) <i>The Dynamics of Political Literacy among Coastal Women: An Exploration of Political Engagement in Lhokseumawe</i>	Penelitian Kualitatif	Mengeksplorasi faktor sosial dan literasi yang memengaruhi keterlibatan politik perempuan pesisir.	Partisipasi politik perempuan pesisir dipengaruhi oleh norma budaya, persepsi gender bias, dan rendahnya literasi politik. Stereotip bahwa politik adalah domain laki-laki menjadi penghalang psikologis dan sosial yang kuat.
4.	(Kushandajani <i>et al.</i> , 2023) <i>Kemandirian Perempuan Pedesaan dalam Menentukan Pilihan Politik di Ranah Pemilihan Kepala Desa</i>	Penelitian Kualitatif (Pendekatan Sosiologi & Psikologi)	Menganalisis kemandirian perilaku memilih (<i>voting behavior</i>) perempuan pedesaan.	Perilaku memilih perempuan pedesaan cenderung tidak mandiri. Pilihan mereka sangat bergantung pada referensi figur laki-laki yang dianggap sebagai panutan (suami, orang tua, atau tokoh masyarakat).
5.	Schaffer (2014) <i>Not-So-Individual Voting: Patriarchal Control and</i>	Studi Komparatif	Mengkaji fenomena pemungutan suara yang tidak bersifat individual	Pilihan politik perempuan sering kali berada di bawah kendali figur laki-laki dalam keluarga (<i>controlled voting</i>).

	<i>Familial Hedging in Political Elections around the World</i>		(controlled voting).	Pemungutan suara bukan tindakan personal, melainkan keputusan kolektif keluarga yang menegaskan struktur kekuasaan patriarki.
6.	Riani et al. (2023) <i>Hambatan Dalam Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pada Partisipasi Politik Perempuan di Sumatera Barat</i>	Penelitian Kualitatif (Analisis Framework Kabeer)	Menganalisis hambatan keterwakilan perempuan menggunakan kerangka <i>Resources, Agency, Achievements</i> .	Hambatan utama meliputi kurangnya wadah belajar politik (<i>resources</i>) dan budaya politik yang belum ramah gender (stereotip), meskipun berada dalam struktur masyarakat dengan budaya matrilineal.
7.	Susanti et al. (2021) <i>Agency Perempuan pada Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan</i>	Penelitian Kualitatif (Analisis Framework Kabeer)	Mengungkap agensi dan posisi tawar (<i>bargaining position</i>) perempuan di lingkungan pesantren patriarkis.	Agensi perempuan diwujudkan melalui <i>power</i> untuk mengambil peran penting. <i>Power</i> ini diperoleh dari pemberdayaan yang mencakup <i>resources</i> (pendidikan/jaringan), <i>agency</i> (negosiasi), dan <i>achievement</i> (prestasi).
8.	Ashraf (2025) <i>Agency and Autonomy: Subversive</i>	Penelitian Kualitatif	Menganalisis praktik negosiasi agensi perempuan di	Perempuan (terutama generasi muda) menggunakan praktik subversif

	<i>Practices in Intergenerational Intra Household Bargaining in Karachi</i>		tingkat rumah tangga.	atau negosiasi halus di ruang privat untuk mendapatkan otonomi. Meski secara formal tunduk, mereka menegosiasikan keputusan kecil yang secara akumulatif memperluas agensi mereka.
9.	Devi et al. (2025) <i>Pemberdayaan Perempuan Dalam Perwali Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Kota Surabaya</i>	Penelitian Kualitatif Deskriptif (Analisis Framework Kabeer)	Menganalisis pemberdayaan perempuan melalui program Sekolah Perempuan (Sekoper) Informal 'Srikandi'.	Program pemberdayaan pemerintah berhasil meningkatkan akses pendidikan/ekonomi (<i>resources</i>) dan kepercayaan diri perempuan untuk berpendapat (<i>agency</i>). Namun, pencapaian (<i>achievements</i>) belum inklusif karena sasaran program terkadang bias pada kalangan berpendidikan tinggi, bukan kelompok rentan
10.	Lestari et al. (2025) <i>Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Sosial Budaya: Studi Kasus Desa</i>	Kualitatif Studi Kasus (Analisis Framework Kabeer)	Menganalisis kualitas partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial budaya desa berdasarkan	Terdapat kesenjangan agensi antar generasi; perempuan dewasa lebih berani bersuara dibanding pemuda. Secara umum, partisipasi masih bersifat

	<i>Ringinanom, Kecamatan Tempuran</i>		kelompok usia.	simbolik dan operasional (<i>agency</i> terbatas), serta belum mencapai pengaruh nyata dalam keputusan strategis desa (<i>achievements</i>)
--	---	--	-------------------	--

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Konsep Otonomi Politik

Otonomi adalah konsep sentral dalam pemahaman modern mengenai martabat individu dan menjadi prinsip inti dalam etika terapan. Secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Yunani kuno, *autos* “diri” dan *nomos* “hukum”, yang secara harfiah berarti “aturan-diri” atau *self-rule*. Awalnya, konsep ini digunakan untuk menggambarkan entitas politik seperti negara-kota yang berwenang menentukan urusannya sendiri (Anderson, 2013).

Schneewind dalam Anderson (2013) mengemukakan bahwa sejak abad ke-17 dan ke-18, konsep otonomi mulai diterapkan pada individu, di mana pribadi yang otonom adalah mereka yang memerintah diri sendiri (*self-governing*) dan menjalani hidup berdasarkan pandangan mereka sendiri dengan menekankan pada kebebasan personal dalam menentukan jalan hidup. Will Kymlicka mengaitkan nilai kebudayaan dengan otonomi individu, dengan berargumen bahwa sebuah kebudayaan penting

dihargai sejauh memungkinkan anggotanya menjalani kehidupan yang otonom. Dalam kerangka yang sama, Joseph Raz (1986) menegaskan bahwa otonomi hanya mungkin jika individu memiliki pilihan yang nyata dan beragam: *“if a life does not have diverse choices, then that life is not autonomous, as ‘autonomy presupposes a variety of conflicting considerations’”* (Dryzek *et al.* 2006: 152). Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebebasan memilih bukan hanya tentang ketiadaan paksaan, tetapi juga tentang tersedianya pluralitas nilai, kesempatan, dan sumber daya.

Namun, teori feminis mengkritik pandangan yang terlalu individualistik dengan menekankan bahwa otonomi individu tidak pernah bebas dari relasi sosial, terutama relasi gender dan kekuasaan. Kritik tersebut melahirkan pendekatan yang disebut sebagai otonomi relasional (*relational autonomy*). Mengacu pada Mackenzie & Stoljar (2000) pendekatan ini menolak gagasan bahwa otonomi adalah kemandirian absolut. Sebaliknya, mereka mengajukan tiga premis utama: (1) individu pada dasarnya adalah makhluk yang tertanam secara sosial (*socially embedded*); (2) identitas terbentuk melalui relasi sosial yang kompleks seperti gender dan kelas; dan (3) kondisi sosial yang tidak adil atau opresif dapat menghambat kompetensi otonomi seseorang. Perspektif ini menegaskan bahwa otonomi seorang istri nelayan tidak bisa dinilai semata-mata dari kemandiriannya mengambil keputusan terpisah dari suami, melainkan harus dilihat dalam konteks relasi sosial yang membentuk identitasnya.

Pandangan ini sejalan dengan teori politik modern sebagaimana dijelaskan dalam *The Oxford Handbook of Political Theory* pada bab *Politicizing the Body: Property, Contract, And Rights* bahwa “*the capacity for autonomy, or self-determination, is dependent on appropriate social contexts, certain kinds of ongoing relations with others, and so on, if it is to be actualized and maintained*” (Gatens, 2006: 689). Artinya, otonomi menuntut adanya hubungan sosial, institusi, dan norma yang menopang agar individu dapat benar-benar merealisasikan kemampuan menentukan dirinya. Dengan demikian, otonomi bukanlah konsep ahistoris, melainkan terkait erat dengan kondisi sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya.

Dalam sebuah negara demokrasi, otonomi politik pada dasarnya adalah bentuk kemandirian yang dijalankan oleh individu dalam kapasitasnya sebagai warga negara yang berpartisipasi dalam kehidupan kolektif (Anderson, 2013). Dalam sebuah negara demokrasi, warga negara idealnya tidak sekadar menjadi objek hukum atau target mobilisasi, melainkan bertindak sebagai subjek pembuat keputusan bagi diri mereka sendiri secara kolektif. Otonomi politik berarti individu secara sadar dan sukarela tunduk pada kebijakan yang turut ia tentukan arahnya (Rostbøll, 2009). Berangkat dari pemahaman tersebut, otonomi politik di tingkat pemilih tidak sekadar dimaknai sebagai kehadiran fisik formal di bilik suara, melainkan mencakup kapasitas warga negara,

termasuk kelompok rentan seperti perempuan untuk mengekspresikan preferensinya secara bebas dari dominasi dan koersi.

Dalam kajian perilaku memilih, Robert Dahl menegaskan bahwa salah satu prasyarat utama demokrasi adalah *effective participation* dan *enlightened understanding* (Dahl, 1971). *Effective participation* berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk menyatakan preferensinya sebelum keputusan kolektif dibuat. Sementara itu, *enlightened understanding* merujuk pada kemampuan warga untuk memperoleh dan memahami informasi yang relevan guna mengevaluasi alternatif politik secara rasional. Dengan demikian, otonomi pemilih dalam perspektif Dahl mensyaratkan adanya kesempatan politik yang setara serta kapasitas informasional yang memadai.

Sementara itu, Samuel P. Huntington membedakan antara partisipasi politik yang bersifat otonom dan partisipasi yang dimobilisasi (Huntington, 1968). Partisipasi otonom muncul dari kesadaran dan inisiatif individu, sedangkan partisipasi yang dimobilisasi terjadi ketika pilihan politik diarahkan atau digerakkan oleh elite, patron, atau struktur kekuasaan tertentu. Dalam masyarakat dengan struktur sosial yang hierarkis, partisipasi sering kali tidak sepenuhnya merupakan ekspresi kehendak bebas, melainkan hasil dari relasi patronase atau tekanan sosial.

Berdasarkan kedua perspektif tersebut, otonomi pemilih dalam penelitian ini dioperasionalkan ke dalam beberapa indikator. Pertama, independensi pengambilan keputusan, yakni pemilih menentukan

pilihannya tanpa tekanan langsung dari suami, keluarga, atau komunitas. Kedua, kapasitas informasional, yakni pemilih memahami alternatif kandidat dan program secara memadai (Dahl, 1971). Ketiga, inisiatif politik pribadi, yakni keputusan memilih lahir dari kesadaran individu, bukan sekadar hasil mobilisasi (Huntington, 1968). Keempat, kebebasan dari relasi dominatif, khususnya dalam konteks relasi domestik yang dapat membatasi pilihan politik perempuan.

Dengan demikian, konsep otonomi pemilih dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai kebebasan normatif dalam pengertian filosofis, tetapi sebagai kondisi politik yang konkret dan terukur, yaitu ketika seorang pemilih memiliki kesempatan, kapasitas, serta kebebasan untuk menentukan pilihannya secara independen dalam struktur sosial yang melingkupinya.

1.6.2 Kerangka Pemberdayaan Naila Kabeer

Penelitian mengenai otonomi politik perempuan pesisir pada dasarnya berada pada irisan antara teori perilaku memilih, teori demokrasi, dan teori pemberdayaan gender. Dalam khazanah ilmu politik, konsep otonomi politik dan partisipasi telah banyak dibahas oleh pemikir demokrasi seperti Robert Dahl dan ilmuwan politik pembangunan seperti Samuel P. Huntington. Dahl (1971) menekankan pentingnya *effective participation*, kesetaraan suara (*voting equality*), serta kontrol warga terhadap agenda politik sebagai prasyarat utama

demokrasi yang substantif. Sementara itu, Huntington (1968) melihat partisipasi politik sebagai konsekuensi dari proses modernisasi, terutama melalui peningkatan pendidikan, mobilisasi sosial, dan diferensiasi struktur politik.

Namun demikian, kedua pendekatan tersebut lebih menekankan dimensi prosedural dan struktural dalam sistem politik, serta belum secara spesifik menjelaskan bagaimana relasi kuasa di tingkat domestik memengaruhi kemampuan individu, khususnya perempuan untuk menjalankan otonomi politiknya. Dalam konteks perempuan pesisir yang hidup dalam struktur ekonomi keluarga nelayan yang cenderung patriarkal, persoalan otonomi politik tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan akses terhadap sumber daya dan juga posisi tawar mereka dalam rumah tangga.

Pendekatan kapabilitas dari Amartya Sen memberikan fondasi normatif yang lebih mendalam dengan menekankan konsep *substantive freedom* sebagai kemampuan nyata seseorang untuk memilih dan bertindak (Sen, 1999). Bagi Sen, pembangunan harus dipahami sebagai perluasan kebebasan substantif individu, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Namun, pendekatan ini masih bersifat umum dan tidak secara khusus mengelaborasi dimensi relasi gender dalam rumah tangga sebagai arena distribusi sumber daya dan kekuasaan.

Dalam konteks inilah kerangka Naila Kabeer menjadi relevan dan dipilih sebagai alat analisis utama penelitian ini. Kabeer (1999)

mengembangkan kerangka pemberdayaan perempuan melalui tiga dimensi utama: *resources*, *agency*, dan *achievements*. Berbeda dengan Sen yang menekankan kapabilitas secara konseptual, Kabeer mengoperasionalkan gagasan tersebut dengan menyoroti bagaimana akses terhadap sumber daya, seperti pendidikan, ekonomi, dan jaringan sosial memengaruhi kapasitas perempuan untuk bertindak (*agency*) dan menghasilkan capaian tertentu (*achievements*), termasuk dalam ranah pengambilan keputusan.

Perlu ditegaskan bahwa Kabeer bukanlah pakar perilaku politik maupun teori demokrasi. Namun, justru perspektif gender yang ditawarkannya menjadi kontribusi penting dalam memperkaya analisis perilaku memilih, khususnya dalam konteks perempuan yang berada dalam struktur relasi kuasa domestik. Dengan menggunakan kerangka Kabeer, penelitian ini dapat menjelaskan bahwa otonomi pemilih perempuan bukan sekadar persoalan preferensi politik individual, melainkan hasil dari interaksi antara akses sumber daya, posisi tawar dalam keluarga, serta norma sosial yang melingkupinya (Kabeer, 1999).

Dengan demikian, teori Dahl (1971) dan Huntington (1968) digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan normatif mengenai otonomi dan partisipasi politik dalam sistem demokrasi, sementara pendekatan Sen (1999) memberikan dasar konseptual mengenai kebebasan substantif. Adapun kerangka Kabeer (1999) dipilih sebagai pisau analisis utama karena mampu menjembatani dimensi struktural

(sumber daya), dimensi tindakan (agensi), dan dimensi hasil (capaian) dalam konteks relasi gender yang secara empiris menjadi fokus penelitian ini.

Penelitian ini menempatkan agensi sebagai fokus utama sekaligus mekanisme yang memungkinkan terbentuknya otonomi politik perempuan. Untuk menelusuri mekanisme tersebut secara empiris dalam konteks relasi gender dan politik elektoral, Kabeer (1999) memandang pemberdayaan sebagai proses di mana individu memperoleh kemampuan untuk membuat pilihan strategis dalam hidupnya (*strategic life choices*). Kemampuan untuk melakukan pilihan strategis ini dapat dipahami melalui interaksi tiga dimensi yang saling terhubung, yaitu:

a. *Resources*

Resources atau sumber daya tidak hanya terbatas pada aspek material, tetapi juga mencakup sumber daya manusia dan sosial yang memperkuat kemampuan individu untuk membuat pilihan. Sumber daya ini diperoleh melalui berbagai hubungan sosial dalam institusi seperti keluarga, pasar, dan komunitas, baik dalam bentuk alokasi nyata maupun klaim di masa depan (*future claims*). Akses terhadap sumber daya ini sangat dipengaruhi oleh aturan dan norma distribusi yang berlaku di masyarakat.

Oleh karena itu, distribusi sumber daya material/uang (sumber daya alokatif) seringkali tertanam (*embedded*) di dalam distribusi sumber daya otoritatif, yaitu wibawa atau kemampuan

menentukan prioritas dan menegakkan klaim. Dalam konteks ini, aktor-aktor tertentu seperti kepala rumah tangga (suami), tokoh agama, atau elit komunitas memiliki otoritas pengambilan keputusan mutlak berdasarkan hierarki posisi mereka dalam institusi sosial.

b. *Agency*

Agency atau agensi adalah kemampuan untuk mendefinisikan tujuan seseorang dan bertindak untuk mencapainya. Agensi lebih dari sekadar tindakan yang dapat diamati, ia juga mencakup makna, motivasi, dan tujuan yang dibawa individu dalam aktivitasnya, termasuk kesadaran akan dirinya sebagai agen, atau *“the power within.”*

Dalam literatur ilmu sosial, agensi sering dioperasionisasikan sebagai pengambilan keputusan, tetapi sebenarnya ia dapat berbentuk beragam. Agensi dapat berupa *bargaining and negotiation* (tawar-menawar dan negosiasi), *resistance and subversion* (subversi dan perlawanan), *deception and manipulation* (penipuan dan manipulasi) maupun *cognitive processes* atau proses kognitif yang lebih abstrak seperti refleksi dan analisis. Agensi dapat dijalankan oleh individu maupun oleh kolektivitas.

Agensi memiliki makna positif maupun negatif dalam kaitannya dengan kekuasaan. Dalam arti positif, sebagai *“power to”*, agensi merujuk pada kapasitas seseorang untuk menentukan pilihan

hidupnya sendiri dan mengejar tujuannya, bahkan di tengah penolakan orang lain. Namun, agensi juga dapat dijalankan dalam arti negatif sebagai “*power over*”, yakni kemampuan suatu aktor atau kelompok untuk menyingkirkan atau mengatasi agensi orang lain, misalnya melalui kekerasan, paksaan, atau ancaman.

c. *Achievements*

Dimensi ketiga adalah *achievements*, yaitu hasil nyata dari interaksi antara *resources* dan *agency*. *Achievements* mencerminkan sejauh mana pilihan yang bernilai dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Mengacu pada Amartya Sen dalam Kabeer (1999) menggunakan konsep *capabilities* dan *functionings* untuk menjelaskan capaian:

1. *Capabilities* adalah potensi atau peluang yang dimiliki seseorang untuk menjalani kehidupan yang mereka anggap bernilai.
2. *Functionings* adalah cara *being and doing* yang bernilai menurut individu dalam suatu konteks sosial tertentu.
3. *Functioning achievements* adalah cara *being and doing* yang benar-benar terwujud dalam kehidupan seseorang.

Capaian perempuan dalam konteks politik, misalnya, dapat dilihat dari partisipasi aktual dalam pemilihan, meningkatnya kesadaran politik, serta kemampuan menentukan pilihan secara otonom. Namun, kegagalan untuk mencapai capaian yang bernilai

harus dipahami secara hati-hati, jika berasal dari preferensi atau prioritas individu, maka bukan isu kekuasaan, tetapi jika berasal dari keterbatasan mendasar dalam kemampuan memilih, maka hal itu merupakan bentuk *disempowerment* (Kabeer, 1999).

1.7 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.2 Operasionalisasi Konsep

Variabel	Dimensi	Definisi Konseptual	Indikator
Otonomi Politik Perempuan Pesisir <i>(mengacu pada konsep empowerment)</i>	Resources (Sumber Daya)	Resources adalah kondisi yang memungkinkan individu membuat pilihan, meliputi sumber daya material (ekonomi), manusia (pengetahuan/keterampilan), dan sosial (jaringan/dukungan). Akses terhadap sumber daya dipengaruhi oleh norma dan struktur sosial.	1. Kapasitas informasional, yakni sejauh mana perempuan memiliki akses pendidikan dan pemahaman memadai terkait alternatif kandidat dan program kerja (Dahl, 1971). 2. Kepemilikan atau kontrol terhadap sumber ekonomi (pendapatan, pekerjaan, usaha). 3. Dukungan sosial dan jaringan (keluarga, komunitas, organisasi perempuan).

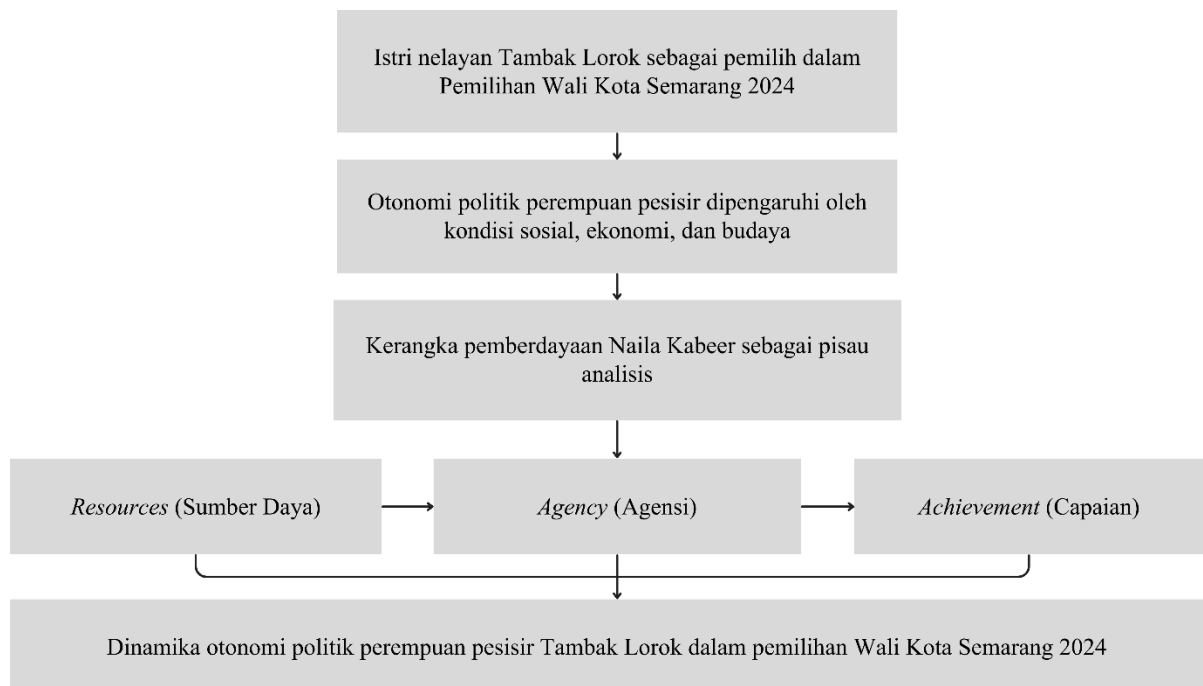
	<i>Agency</i> (Agensi)	Agensi adalah kemampuan mendefinisikan tujuan dan bertindak untuk mencapainya. Agensi tidak hanya berarti tindakan nyata, tetapi juga mencakup makna motivasi, dan “<i>the power within</i>” untuk mengambil keputusan, bernegosiasi, bahkan menolak tekanan.	1. Independensi pengambilan keputusan, yakni pemilih mampu menentukan pilihan tanpa tekanan langsung (kebebasan dari relasi patriarki). 2. Inisiatif politik pribadi, yakni keputusan lahir dari kesadaran individu, bukan sekadar hasil mobilisasi patronase (Huntington, 1968). 3. Keberanian mengungkapkan pendapat politik dalam keluarga atau masyarakat. 4. Kesadaran terhadap hak politik dan peran dirinya sebagai warga negara.
	<i>Achievements</i> (Capaian)	<i>Achievements</i> merupakan hasil nyata dari pilihan dan tindakan seseorang, berupa perubahan dalam kehidupan dan kedudukan sosial.	1. Partisipasi aktif dalam pemilihan dan kegiatan politik lokal. 2. Peningkatan kepercayaan diri dan

		Dalam konteks pemberdayaan, capaian dilihat dari meningkatnya kemampuan perempuan memengaruhi keputusan publik dan relasi kekuasaan.	pengakuan sosial terhadap peran politik perempuan. 3. Perubahan sikap keluarga terhadap keputusan politik perempuan. 4. Dampak sosial dan ekonomi dari keterlibatan politik.
--	--	--	---

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

1.8 Kerangka Berpikir

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti, 2025

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam pengalaman, pemaknaan, serta dinamika agensi perempuan pesisir dalam menunjukkan otonomi politiknya pada Pemilihan Wali Kota Semarang 2024. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana perempuan sebagai aktor sosial membangun pilihan politiknya dalam konteks struktur keluarga, budaya pesisir, dan lingkungan sosial (Rukajat, 2018: 4).

Menurut Creswell (dalam Rukajat, 2018: 5), pendekatan kualitatif berangkat dari pengalaman, nilai sosial, dan konteks historis untuk menemukan pola dan makna tertentu. Desain studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena khusus, yaitu otonomi politik perempuan pesisir Tambak Lorok. Studi kasus ini difokuskan pada dinamika perempuan pesisir dalam mengakses sumber daya, menggunakan agensi, dan mencapai capaian politik sebagaimana dijelaskan dalam perspektif Naila Kabeer.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kampung Nelayan Tambak Lorok, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik masyarakat pesisir yang unik, dengan tingkat keterlibatan perempuan yang tinggi dalam ekonomi rumah tangga dan sosial komunitas. Selain itu, Tambak Lorok merupakan wilayah yang menghadapi tantangan struktural berupa kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, dan norma sosial yang memengaruhi otonomi politik perempuan, khususnya dalam konteks Pemilihan Wali Kota Semarang 2024.

1.9.3 Subjek Penelitian

Sinaga (2023: 76) mengemukakan bahwa subjek penelitian mengacu pada individu, kelompok, atau pihak tertentu yang menjadi sumber informasi dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, penentuan subjek dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan subjek sebagai sampel penelitian yang didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu (Moleong dalam Rukajat, 2018: 16). Pertimbangan ini bertujuan agar data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian mengenai dinamika agensi dan otonomi politik. Adapun kriteria subjek penelitian yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Istri nelayan di Tambak Lorok yang memiliki peran ganda (mengurus rumah tangga dan berkontribusi ekonomi), serta terdaftar sebagai pemilih tetap dalam Pilwalkot Semarang 2024. Kelompok ini menjadi

sumber data primer untuk menggali pengalaman agensi dan pengambilan keputusan politik.

2. Suami nelayan, sebagai pihak yang dipilih untuk memverifikasi data mengenai pola relasi kuasa dalam rumah tangga dan proses diskusi politik keluarga.
3. Tokoh masyarakat setempat, seperti Ketua KPPI (Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia) maupun Ketua RT yang dipilih untuk memberikan gambaran mengenai konteks sosial-budaya dan pola mobilisasi politik di lingkungan Tambak Lorok.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, peneliti juga memanfaatkan teknik *snowball sampling* (bola salju). Peneliti meminta rekomendasi dari informan kunci yang telah diwawancarai untuk mengidentifikasi dan mendapatkan akses kepada calon informan lain yang memenuhi kriteria, sehingga data yang diperoleh semakin mendalam dan jenuh.

Penentuan jumlah informan dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip kejenuhan data (*data saturation*). Dalam penelitian kualitatif, jumlah informan ditentukan berdasarkan tercapainya titik di mana informasi yang diperoleh mulai berulang dan tidak lagi menghasilkan temuan baru yang signifikan (Guest *et al.*, 2006). Setelah wawancara dilakukan secara bertahap, peneliti menemukan bahwa pola jawaban terkait relasi pengambilan keputusan politik, pengaruh suami, serta akses terhadap informasi politik menunjukkan kecenderungan yang serupa dan telah membentuk pola yang konsisten. Oleh karena itu, proses

pengumpulan data dihentikan pada jumlah 22 informan, dengan 15 istri nelayan, 5 suami nelayan, dan 2 tokoh masyarakat, karena telah mencapai titik kejenuhan.

Selain itu, penggunaan teknik *purposive* dan *snowball* sampling dalam penelitian ini bertujuan untuk memilih informan yang secara substantif relevan dengan fokus penelitian, yakni istri nelayan yang terlibat dalam proses pemilihan Wali Kota Semarang 2024. Penelitian kualitatif dengan pendekatan *purposive* sampling tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi statistik terhadap populasi, melainkan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti (Creswell, 2014).

Dengan demikian, jumlah 22 informan dipandang memadai secara metodologis karena telah memenuhi prinsip kejenuhan data serta memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap dinamika otonomi politik perempuan pesisir dalam konteks relasi domestik dan struktur sosial komunitas nelayan.

Berdasarkan teknik tersebut, berikut adalah rincian profil informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini:

Tabel 1.3 Daftar Informan Penelitian

No	Kode Informan	Usia	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan Utama	Kategori Informan
1	TM1	55 th	SMA	Ketua KPPI Kota Semarang	Tokoh Masyarakat

2	TM2	41 th	SMA	Ketua RT 06/ Nelayan	Tokoh Masyarakat
3	P1	52 th	Tidak Sekolah	Ibu Rumah Tangga (Buruh Serabutan)	Istri Nelayan
4	P2	50 th	Tidak Sekolah	Ibu Rumah Tangga (Bakul Ikan)	Istri Nelayan
5	P3	52 th	SMP	Pemilik Warung	Istri Nelayan
6	P4	47 th	SD	Ibu Rumah Tangga	Istri Nelayan
7	P5	35 th	SD	Ibu Rumah Tangga (Serabutan)	Istri Nelayan
8	P6	50 th	SMP	Ibu Rumah Tangga (Bakul Ikan)	Istri Nelayan
9	P7	41 th	SD	Ibu Rumah Tangga (Bakul Ikan)	Istri Nelayan
10	P8	53 th	Tidak Sekolah	Ibu Rumah Tangga (Bakul Ikan)	Istri Nelayan
11	P9	29 th	SMA	Ibu Rumah Tangga (Kerang Hijau)	Istri Nelayan
12	P10	52 th	SD	Pengasapan Ikan	Istri Nelayan
13	P11	42 th	SMP	Usaha Ikan Krispi	Istri Nelayan
14	P12	54 th	Tidak Sekolah	Usaha Kerang Hijau	Istri Nelayan
15	P13	39 th	SMA	Usaha Peyek	Istri Nelayan

16	P14	46 th	SMP	Usaha Katering & Sayur	Istri Nelayan
17	P15	54 th	SD	Usaha Bandeng Presto	Istri Nelayan
18	S1	54 th	Tidak Sekolah	Nelayan	Suami
19	S2	55 th	SD	Nelayan & Ketua RT	Suami
20	S3	54 th	Tidak Sekolah	Nelayan	Suami
21	S4	33 th	SMP	Nelayan	Suami
22	S5	50 th	SD	Nelayan	Suami

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2025

1.9.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Menurut Hadi (2015: 91), data kualitatif merupakan data yang pengukurannya dilakukan secara tidak langsung. Data ini disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, yaitu perempuan pesisir, terutama istri nelayan, suami nelayan, dan tokoh masyarakat. Selain

itu data primer juga dapat didapatkan peneliti melalui observasi langsung lingkungan sosial dan interaksi perempuan di ruang publik maupun domestik.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung, yaitu melalui penelitian terdahulu terkait data partisipasi politik dan laporan pemerintah; penelitian terdahulu tentang partisipasi politik perempuan dan dinamika masyarakat pesisir, dan; arsip media mengenai Pilwalkot Semarang 2024.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Darlington (dalam Anggito Albi & Setiawan , 2018: 110) menyatakan bahwa observasi adalah cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga dengan observasi peneliti dapat melihat, mendengar, dan mendapatkan informasi secara langsung dari kondisi realitas di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menggali data yang bersifat *word view* untuk mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah-masalah yang diteliti Anggito Albi & Setiawan (2018). Nantinya wawancara

yang dilakukan adalah secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman perempuan pesisir dalam menentukan pilihan politik pada Pilwalkot 2024, termasuk negosiasi dengan suami, keluarga, dan lingkungan sosial.

3. Studi Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi diterapkan untuk menganalisis berbagai sumber dokumentasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap peristiwa, objek, dan tindakan yang dapat memperkaya pemahaman peneliti mengenai fenomena atau masalah yang sedang diteliti (Rukajat, 2018 : 26). Dalam penelitian ini, dokumentasi yang nantinya akan dikumpulkan dan digunakan yaitu data berupa laporan, kebijakan, dan catatan terkait Kampung Nelayan Tambak Lorok.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyusun secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, serta studi dokumentasi untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan menyajikan hasilnya sebagai temuan yang dapat dipahami oleh orang lain (Bogdan dan Biklen dalam Winarni, 2018 : 171-174) mengemukakan tiga aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga data sudah jenuh, yang terdiri dari:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah mereduksi data maka selanjutnya adalah menampilkan data yang dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart, dsb. Namun dalam penelitian kualitatif penyajian data yang paling sering digunakan adalah data berupa teks yang bersifat naratif. Tujuannya adalah supaya dapat mempermudah dalam memahami dan merencanakan langkah kerja selanjutnya.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga adalah dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara sehingga akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan kredibel untuk mendukung tahap selanjutnya. Sehingga dalam mengemukakan kesimpulan perlu didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.

1.9.7 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas data tidak diukur melalui angka statistik, melainkan melalui pengecekan kredibilitas yang ketat. Untuk memenuhi standar tersebut, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2013: 241). Tujuan utama penggunaan triangulasi dalam penelitian ini bukan sekadar untuk mencari kebenaran tunggal tentang fenomena otonomi politik perempuan, melainkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti secara mendalam terhadap apa yang telah ditemukan di lapangan (Stainback dalam Sugiyono, 2013: 241).